

PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

Galih Prasongko¹, Ane Permatasari²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

²Prodi Ilmu Pemerintahan dan Pusat Studi SDGS Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: galih.p.isip19@mail.umy.ac.id, anepermatasari@umy.ac.id

ABSTRAK. Stunting sekarang merupakan masalah utama di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pada 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan masa prima bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, kekurangan gizi menyebabkan stunting. Inisiatif pencegahan dan pengendalian stunting masih dievaluasi dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan prioritas Kabupaten Pemalang yang angka kejadian stunting cukup tinggi (22,94%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana *Collaborative Governance* diterapkan secara lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kasus stunting di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini berjenis kualitatif Karena penelitian kualitatif dapat menggambarkan peristiwa dan fenomena yang dinamis dan terus berkembang, maka digunakanlah penelitian ini. Pengumpulan data bersumber dari data primer, hasil wawancara dari instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan *collaborative governance*, dan data sekunder dokumen-dokumen yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif telah berhasil diterapkan di Kabupaten Pemalang telah berjalan dengan baik. Selain itu, *collaborative governance* yang diterapkan terbukti mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Pemalang secara signifikan setiap tahunnya.

Kunci: *collaborative governance*; pencegahan; penanggulangan; penurunan; stunting.

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN STUNTING PREVENTION AND CONTROL IN PEMALANG REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE

ABSTRACT. Stunting is a major problem in Indonesia and throughout the world. In the first 1000 days of life, which is the prime period for human growth and development, malnutrition causes stunting. Stunting prevention and control initiatives are still being evaluated and implemented by the Indonesian government. Prevention and control of stunting is a priority for Pemalang Regency, where the incidence of stunting is quite high (22.94%). The aim of this research is to examine how Collaborative Governance is implemented locally and how it affects stunting cases in Pemalang Regency. This research is of a qualitative type. Because qualitative research can describe events and phenomena that are dynamic and continuously developing, this research was used. Data collection comes from primary data, the results of interviews from government and private agencies in the implementation of collaborative governance, and secondary data from documents obtained from the literature study. The results of the research show that the implementation of collaborative governance has been successfully implemented in Pemalang Regency and has gone well. Apart from that, the collaborative governance implemented has been proven to be able to reduce the stunting rate in Pemalang Regency significantly every year.

Keywords: *collaborative governance*; prevention; prevention; reduction; stunting.

PENDAHULUAN

Stunting ialah keadaan balita yang mengalami keterlambatan tumbuh kembangnya dan memiliki postur tubuh yang lebih pendek dari standar untuk usianya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh kemenkes bahwa balita stunting dengan masalah gizi kronis biasanya lebih pendek dari anak seusianya (Kemenkes, 2018).

Lebih lanjut, menurut Ramayulis, dkk. (2018), malnutrisi kronis, mengakibatkan stunting atau kegagalan tumbuh kembang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Ketidak mampuan tumbuh kembang pada bayi (0–11 bulan) dan balita (12–59 bulan, membuat anak terlalu pendek untuk usianya. Malnutrisi pada pra-kehamilan dan selama kehamilan berpengaruh terhadap kelahiran IUGR (*intrauterine growth restriction*) dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Selain itu, hipertensi ibu selama kehamilan merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap IUGR (Cesar et al., 2008).

Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor risiko yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita. Menurut Proverawati dan Ismawati (2010), karena bayi BBLR mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin sejak lahir dan akan terus mengalaminya hingga mencapai usia dewasa, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan lebih lambat. Jika dibandingkan dengan bayi yang lahir normal, bayi Setelah lahir, BBLR berkembang dan tumbuh lebih lambat, sering kali tidak mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan sesuai usianya. Ketidakmampuan saluran cerna dalam memecah protein dan menyerap lemak mengakibatkan cadangan nutrisi tubuh semakin menipis, sehingga bayi BBLR juga mengalami gangguan pencernaan akibat kelainan pada sistem pencernaannya. Mengakibatkan tumbuh kembang bayi dengan Riwayat BBLR akan mengalami kendala dalam pertumbuhan tinggi (Proverawati, A., & Ismawati, C., 2010).

Bagi sebagian besar negara di dunia, stunting masih menjadi masalah serius. Populasi balita stunting dunia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa lebih dari separuh (55%) Asia merupakan wilayah penghasil balita stunting terbanyak di dunia (39%) diikuti oleh Afrika. Indonesia memiliki prevalensi stunting tertinggi ketiga pada anak balita, menurut data Southeast Asia/South-East Asia Regional (SEAR). Antara tahun 2005 dan 2017, rata-rata angka stunting pada balita di Indonesia adalah 36,4%. Dalam WHO (2018) Jawa Tengah memiliki angka prevalensi stunting di atas 20% yang sebanding dengan angka nasional. Berdasarkan laporan Riskesdas 2018, Di Jawa Tengah, 32,1% anak usia 0 hingga 1 tahun mengalami stunting pada tahun 2019. Dibandingkan dengan prevalensi stunting sebesar 28,5% pada tahun 2017 (Anggraeni & Handayani, 2021: 674), angka tersebut mengalami peningkatan.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang sedang menghadapi krisis stunting. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2019 menunjukkan Kabupaten Pemalang memiliki angka stunting sebesar 22,94%, menjadikannya salah satu dari 14 kabupaten zona merah miskin di Jawa Tengah. Data stunting Kabupaten Pemalang berdasarkan tahun ketahun, selalu mengalami penurunan hal ini menunjukan bagaimana, keseriusan pemerintah dalam menjalankan *collaborative government* pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah ini. Berdasarkan data yang di peroleh dapat di paparkan bagaimana keadaan jumlah stunting di Kabupaten Pemalang per tahun pada tabel 1.

Tabel 1. Tabel Jumlah Stunting di Kabupaten Pemalang

No	Tahun	Jumlah Angka Stunting
1	2013	46,3
2	2014	24,76
3	2015	23
4	2016	21,9
5	2017	22,94
6	2018	17,6

PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

(Galih Prasongko, Ane Permatasari)

7	2019	16,95
8	2020	12,7
9	2021	10,4
10	2022	9,61

(Sumber: DinsosKBPP Kab. Pemalang)

Serta Kondisi atau keadaan stunting saat ini di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari dua aspek pada permasalahan stunting anak, yakni data baduta dan balita. Baduta merupakan penjelasan dari anak yang mana usianya di bawah dua tahun atau 0-24 bulan atau biasa lebih dikenal dengan masa/periode pertumbuhan emas. Secara bahasa umum, sering juga disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan HPK. Sementara itu, Anak-anak di bawah usia lima tahun dianggap balita. tabel 2 , merupakan tabel data baduta dan balita stunting per agustus 2022 di Kabupaten Pemalang:

Tabel 2. Data Baduta dan Balita Stunting per Agustus 2022 di Kabupaten Pemalang

NO	Kecamatan	Baduta Stunting	Balita Stunting
1	Ampelgading	83	381
2	BantarBolang	232	742
3	Belik	181	380
4	Bodeh	147	479
5	Comal	166	981
6	Moga	85	211
7	Pemalang	510	1475
8	Petarukan	134	297
9	Pulosari	36	195
10	Randudongkal	128	408
11	Taman	340	916
12	Ulujami	188	573
13	Warungpring	14	40
14	Watukumpul	92	323
	Jumlah	2336	7401

(Sumber: DinsosKBPP Kab. Pemalang 2022)

Permasalahan stunting Di Kabupaten Pemalang pada indikator Data Balita stunting juga masih menunjukkan cukup banyak seperti data di atas. Kecamatan Pemalang masih menjadi urutan pertama, selain itu dengan kasus permasalahan stunting paling terendah berada di wilayah Kecamatan Warungpring dengan jumlah balita stunting sebanyak 40.

Permasalahan stunting telah diupayakan untuk di atasi oleh pemerintahan. Salah satunya melalui tata kelola kolaboratif. Tata kelola tersebut adalah perkembangan dan tren baru yang menarik dalam studi tata kelola (Ansell dan Gash, 2008). Dalam beberapa peraturan pemerintah di bidang Kesehatan, menyiratkan bahwa pemerintah harus melibatkan pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Otonomi daerah dan tata kelola kolaboratif terlihat berkembang di berbagai daerah. Khususnya di Kabupaten Banggai yang menjadi perhatian utama pencegahan stunting, sejumlah pemangku kepentingan terlibat aktif dalam penanganan permasalahan kesehatan sebagai bagian dari implementasi program pencegahan stunting di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada rumusan masalah dalam hal pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu mengenai bentuk *collaborative governance*. Akan tetapi, penelitian ini menjelaskan tentang program dan regulasi kebijakan penurunan, pencegahan, dan penanggulangan stunting yang ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Pemalang.

karena program regulasi kebijakan tersebut merupakan dasar hukum dari pelaksanaan *collaborative governance* di kabupaten Pemalang.

Berbagai penelitian tentang *collaborative governance* sudah banyak dilakukan. Putri dan Nurcahyanto (2021) berbicara tentang pemanfaatan kolaboratif tata kelola di Desa Kalirandu, Petarukan, Kab. Pemalang, untuk memerangi stunting. Teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash berhasil diterapkan dalam penelitian ini untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk penurunan angka stunting yang dibuktikan dengan kegiatan kelas stunting bulanan yang dilakukan di Balai Desa Kalirandu. Namun, ditemukan sejumlah tantangan selama proses kolaborasi, antara lain kurangnya dedikasi kepala desa, kelangkaan sumber daya manusia, dominasi sektor kesehatan, dan kendala pengunggahan data.

Hasil penelitian Sukanti & Faidati (2021) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif penelitian yang di kab. Sleman daerah istimewa Yogyakarta ini sudah berjalan dengan baik dengan berdasarkan pada prinsip keterlibatan Bersama, motivasi yang tinggi serta, penelitian tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan mengakibatkan Di Kabupaten Sleman, angka stunting mengalami penurunan. Latihan partisipatif antara lain Getar Thala, Pecah Ranting, Gambang Stunting, dan PANdu TEman. Meskipun demikian, terdapat unsur pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia yang unggul, sumber daya alam yang melimpah, dan anggaran yang mendukung menjadi faktor pendukungnya. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, penolakan sosial, dan kebiasaan pendidikan orang tua yang dipengaruhi oleh tingkat pekerjaan. Latifah Suhada Nisa (2018) Kebijakan Penanganan Stunting di Indonesia Legislasi Indonesia untuk mencegah stunting. Esai ini bertujuan untuk menguraikan hukum dan kebijakan untuk mencegah stunting di Indonesia. Undang-undang dan kebijakan pencegahan stunting sudah ada di Indonesia, dan mereka mengambil bentuk intervensi yang sensitif dan terarah.

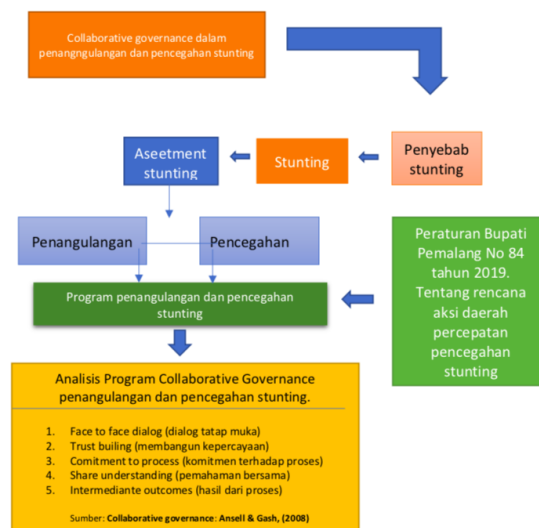
Sektor kesehatan menerapkan intervensi sensitif seperti memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan air bersih yang cukup dan sanitasi yang memadai, serta intervensi yang ditargetkan seperti program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi termasuk pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, dan kemiskinan diketahui berdampak terhadap stunting. Berdasarkan kajian pustaka yang di ambil, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau yang lain yakni dalam penelitian berfokus pada *collaborative governance* yang lebih berfokus pada peranan pihak swasta, perusahaan, PERUSDA di wilayah Kabupaten Pemalang serta peranan dari unsur Pendidikan serta masyarakat, Sehingga dapat mengetahui bagaimana para aktor aktif serta keefektifan dari adanya program tersebut. Kajian ini fokus pada permasalahan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah dan dilakukan di Pemerintah Kab. Pemalang yang merupakan daerah atau kabupaten zona merah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran pada penelitian ini, berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan teori *collaborative governance*, yang mana dijadikan tolak ukur dilapangan sejauhmana penggunaan teori tersebut sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan secara gamblang terkait dengan objek penelitian dan objek permasalahan mengenai *collaborative governance* penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang.

Dengan tingginya jumlah anak stunting di Kabupaten Pemalang yang masih di atas 20%, maka permasalahan tersebut menjadi fokus pemerintahan untuk diatasi. Melalui Peraturan Bupati No 84 terkait Percepatan Aksi Daerah dalam Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pemalang, disusunlah struktur pengurus tim dan organisasi serta program yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di dalamnya. Mengingat bahwa masalah stunting bukan hanya masalah pemerintah daerah, maka dalam penyelesaian masalah ini harus melibatkan unsur lain dalam pelaksanaannya.

Implementasi *collaborative governance* dalam pelaksanaan program-program pemerintah untuk penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang ditujukan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana penerapan *collaborative governance* dan keterlibatan masing unsur terutama pihak publik dan privat (swasta) dalam kerja sama ini, maka peneliti menggunakan teori dari Ansell dan Gash (2008). Melalui 5 poin *collaborative governance*, dapat dilihat skema dalam penerapan *collaborative* di Kabupaten Pemalang, sehingga dapat diketahui bagaimana kekurangan dan kelebihan serta keberhasilan dari penerapan *collaborative* yang ada. Dari hasil tersebut, dimungkinkan untuk dapat diambil kebijakan-kebijakan yang lain (rekomendasi) untuk mempercepat penurunan jumlah angka stunting di Kabupaten Pemalang. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: olahan Peneliti (2023)

METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif, atau pendekatan yang mengkaji objek dalam keadaan aslinya, digunakan dalam penelitian ini. Cara pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang tercantum dalam lampiran, yang namanya disertai dengan pertanyaan yang diajukan. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak DINSOSKBPP menjadi informan dalam penelitian ini. Dan juga DINKES, Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), PERUSDA, Duta Genre. Selanjutnya, untuk melengkapi data, peneliti juga menggunakan Teknik dokumentasi yakni dengan mengambil segala bentuk dokumentasi berupa foto, video, data lapangan yang menjadi bahan dalam pengolahan data pada penelitian ini. Metodologi analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi, itulah yang dikemukakan Sugiyono (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan stunting. Di daerahnya tidak bisa hanya melibatkan satu instansi atau perangkat daerah saja, melainkan harus kolaborasi bersama dalam menurunkan angka stunting di daerah. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada tiga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP), dan Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu perangkat daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Pemalang. (Dinkes), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, penelitian

di lakukan Duta GenRe dan masyarakat. *Penurunan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama, bukan salah satu perangkat daerah atau lembaga lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri* (hasil wawancara kabit DINSOKBPP ibu nur)

Penguatan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Stunting di Kabupaten Pemalang akan memudahkan kolaborasi pencegahan dan pengendalian stunting di kabupaten tersebut. yang mana menjelaskan bahwa sasaran dari pelaksana tugas ini merupakan semua *stakeholder*, sektoral, perangkat daerah atau lembaga. Pimpinan perangkat daerah kepala desa atau lurah ditingkat pemerintah desa atau kelurahan, camat ditingkat kecamatan beserta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada di lingkup sektor pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan peraturan tersebut guna menurunkan angka stunting sebagai arahan pemerintah pusat sampai kedaerah.

Kerjasama dalam masing-masing lembaga pemerintah atau non-pemerintah atau swasta dalam upaya melakukan Dari seluruh aktor yang terlibat dalam penerapan tata kelola kolaboratif dalam pencegahan dan pengendalian stunting, evaluasi terhadap percepatan pencegahan dan pengendalian stunting di Kabupaten Pemalang mendapat penilaian positif. Hal ini sebagaimana terlihat Pemerintah Kabupaten Pemalang menjadi peringkat 1 dalam pelaksanaan *collaborative governance* ditingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. (Dikutip dari wawancara Dinsoskbpp Kab.Pemalang 2022)

Data-data yang mendukung hal tersebut seperti pada pelaksanaan aksi daerah Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Stunting di Kabupaten Pemalang menguraikan bagaimana percepatan pencegahan dan pengendalian stunting di wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui pembentukan tim. Semua kepala perangkat daerah masuk dalam kepengurusan tim aksi daerah percepatan penanggulangan pencegahan stunting, mulai dari Bupati Pemalang sebagai penasehat, Wakil Bupati Pemalang sebagai ketua, Sekda Kabupaten Pemalang sebagai wakil ketua, Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang sebagai wakil ketua satu (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagai wakil ketua dua (2), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang sebagai wakil ketua tiga (3), Masing-masing Dinas di lingkup pemerintah daerah di Kabupaten Pemalang diikutsertakan sebagai koordinator dan anggota tim, serta kepala DINSOSKBPP

Indeks prevalensi balita stunting di Kabupaten Pemalang menunjukkan semakin turunnya prevalensi balita stunting dari tahun ke tahun yang mana angka relatif signifikan terus menerus menurun mulai dari tahun 2014 sampai pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari jumlah anak dengan tubuh pendek pada tahun 2014 sebanyak 18,03% dan pada tahun 2022 angkanya sudah mencapai 7,1% jumlahnya. 9 tahun proses penurunan yang cukup panjang sehingga mampu menurunkan hampir 11% dari tahun pertama penghitungan, sedangkan pada pengukuran anak dengan tinggi badan sangat pendek juga berhasil menurunkan sebanyak 4% lebih yang mana pada tahun 2014 sebanyak 18,03% pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga angkanya menjadi 2,51%.

Preferensinya adalah balita stunting yang jumlahnya juga semakin menurun setiap tahunnya, seiring dengan penurunan signifikan jumlah balita stunting di Kabupaten Pemalang setiap tahunnya. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam menurunkan angka dan jumlah stunting, serta aksi cepat penanggulangan dan pencegahan stunting di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang begitu sangat serius menginginkan dampak dan pengaruh yang luar biasa disebabkan oleh masalah stunting. Selain itu, sebagai bukti dari berjalannya kerjasama yang baik *collaborative governance* Pemerintah Kabupaten Pemalang yang baik dalam pelaksanaannya selalu melibatkan semua aspek *stakeholder* yang berada di

Pemerintah Kabupaten Pemalang, mulai dari Public dalam hal ini pemerintah, Privat atau non-pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan pelajar, serta masyarakat. Semua bergotong-royong saling bekerja sama dengan masing-masing program unggulan yang dimiliki. Masing-

masing lembaga atau perangkat daerah melaksanakan Bersama- sama agar dapat berjalan sesuai dengan tupoksi dan tujuan sehingga dapat memperoleh data atau hasil yang sesuai dari adanya *collaborative governance* dalam pencegahan dan pencegahan stunting Jumlah penurunan angka stunting yang terus menurun secara signifikan dan telah mencapai di bawah batas minimum yang diharapkan oleh pemerintah pusat yakni sebanyak 14%, bahkan Kabupaten Pemalang memiliki angka jumlah stunting dengan angka 9,61%, namun pemerintah terus bergerak melaksanakan program-program yang telah ada dan program unggulan lainnya untuk terus menurunkan jumlah angka stunting di kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

1. Collaborative Governance dalam Penanggulangan dan pencegahan Stunting di Kabupaten Pemalang

Pentingnya penetapan *collaborative governance* dalam menyelesaikan permasalahan atau melaksanakan sesuatu program baik di pemerintah pusat bahkan daerah karena Kerjasama yang baik antar elemen organisasi perangkat daerah akan semakin memperkuat dan mempermudah dalam melakukan dan melaksanakan suatu program yang telah disusun oleh pemerintah atau Instansi dinas terkait.

Kerjasama faktor konvergensi dalam penanganan stunting di Kabupaten Pemalang sudah sangat baik masing-masing organisasi perangkat daerah sudah bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan terus melaporkan perkembangan program hingga mempertanggungjawabkan dari program yang telah diciptakan atau dilaksanakan untuk mempercepat penurunan angka serta pencegahan dan penanggulangan kasus anak stunting di Kabupaten Pemalang (Kabid KB DINSOSKBPP Ibu Nur Hidayat).

Selain itu, juga disampaikan oleh instansi dinas lain yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang terkait pengendalian dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Dalam mempercepat penurunan angka stunting melibatkan semua stakeholder atau dinas terkait di wilayah Kabupaten Pemalang, karena masalah stunting ada atau hadir dari berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh gizi bayi, lingkungan, Pendidikan orang tua, atau pola asuh orang tua kepada anaknya. (Ibu Susi Kusumawati S.KM.M.Kes. Dinkes Kab. Pemalang).

Sehingga dalam melaksanakan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang harus melibatkan semua *stakeholder* yang ada, bilamana ditemukan kasus stunting kepada anak dengan gangguan gizi atau permasalahan Kesehatan yang paling menonjol maka akan dilaksanakan konvergensi antara DINSOSKBPP dengan DINKES.

Anak dengan masalah stunting juga diikuti oleh penyakit-penyakit penyerta, yakni KISPA, Diare, Bapil, dan juga TB. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan memfokuskan terlebih dahulu pada kesembuhan penyakit penyerta. Setelah sembuh dari penyakit penyerta, maka akan lebih fokus kepada anak dengan stunting. Diprediksikan selama Sembilan puluh (90) hari masa pemantuan, akan mengalami perkembangan mulai dari berat badannya meningkat diikuti oleh tinggi badan dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut akan mentas dari status anak stunting.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini khususnya BAPEDA Kabupaten Pemalang yakni sebagai koordinator dalam pelaksanaan pencegahan dan percepatan stunting di Kabupaten Pemalang. Stunting tidak hanya pada masalah penyakit penyerta, namun terhadap lingkungan juga mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, seperti kebersihan rumah, kamar mandi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, setelah dilakukannya audit, maka akan adanya program lanjutan yang dilakukan oleh instansi dinas terkait yakni DINSOSKBPP Dengan Dinas pekerjaan Umum (DPU) untuk membangun atau merenovasi rumah atau kamar mandi/WC yang lebih layak supaya anak dapat berkembang dengan lingkungan jauh lebih sehat pastinya bersih dan nyaman.

Seperti dilaksanakan pada tanggal 27 desember 2022 DINSOSKBPP Bersama dinas Kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan juga BAZNAS memberikan bantuan bedah rumah keluarga stunting di Kalurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, (**Ibu Cicinur Eliyanti dan Ibu Pusapa Indah, S.E. / bidang PMM**)

Hal tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya instansi Pemerintah saja yang terlibat namun juga melibatkan actor swasta dalam pelaksanaan penurunan angka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang.

Collaborative governance di Kabupaten Pemalang dalam menurunkan angka stunting juga dalam pencegahan dan penanggulangan stunting melibatkan sektor swasta berupa PT atau perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah dan lain sebagainya yang mana telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. (**Ibu Susi Kusumawati S.KM., M.Kes. Dinkes Kab. Pemalang**).

Diantara program Kerjasama atau MOU antara DINKES dengan Perusahaan/Swasta yang sudah berjalan yakni sebagai berikut, perusahaan Sarihusada yang mana memberikan bantuan kepada dinas Kesehatan berupa bantuan susu SGM oklaton pada anak dengan Stunting, selain itu ada juga PT Danos Latinan yang bergerak pada mekanisme atau alur pengendalian kasus stunting, dan juga ada Injio yang memiliki peranan sebagai mentor pengisi sosialisasi atau lebih focus kepada kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan terkait dengan stunting.

Kerjasama antar pemerintah ataupun non pemerintah dan pihak swasta lain, berjalannya *collaborative governance* ini sudah sangat bagus dan sudah baik dalam pelaksanaannya dengan indeks yang ada dan didukung oleh data angka stunting semakin menurun jumlah kasus stunting per tahun di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu bentuk keberhasilan penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang.

Tabel 3. Bentuk *collaborative governance* dalam penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang.

NO	Kegiatan	Mitra	Keterangan
1	Bantuan Alat pengukur Panjang Badan Bayi	UGM	
2	Bantuan Jamban sejumlah 549 jamban	Baznas Kab Pemalang	Bantuan khusus di desa lokus stunting
3	Program PAUD HI	KOMPAK	
4	Bantuan Rumah Layak Huni	Bank Jateng	10 RTLH beserta jambannya
5	Pemberian Sembako bergizi bagi keluarga stunting daerah di sekitar pabrik	Perusahaan, Hotel	Program CSR dari perusahaan dan dunia usaha dalam program kepedulian stunting
6	KKN tematik stunting di Desa Lokus stunting	UMP UNDIP	
7	Gong Ceting	UNIKAL	

(Sumber: DinsosKBPP Kab.Pemalang)

2. Program dan pelaksanaan program penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang.

PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

(Galih Prasongko, Ane Permatasari)

Stunting yang menjadi isu nasional saat ini permasalahan besar yang dihadapkan dengan masalah tingginya angka stunting di Indonesia maka dengan demikian pemerintah benar-benar fokus terhadap penurunan Angka stunting harus kurang dari batas maksimal 20% yang ditetapkan WHO, sesuai arahan Wakil Presiden RI. Pemerintah Republik Indonesia memiliki program bahwa Indonesia batas maksimal masalah stunting 14%, sedangkan Indonesia pada saat ini memiliki jumlah masalah stunting sebanyak 27,7%. Segala upaya dan program-program pemerintah melalui *sending sector* kementerian yang membantu tugas presiden. Masing-masing kementerian memiliki tanggung jawab untuk bisa menurunkan jumlah angka stunting di Negara Republik Kesatuan Indonesia.

1. Pencapaian ketahanan pangan dan pemberantasan kelaparan serta segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua dan ketiga, yang mencakup stunting. Pada tahun 2025, targetnya adalah penurunan angka stunting sebesar 40%. Berikut beberapa inisiatif yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting yakni:

a. Ibu hamil dan bersalin

Program-program yang diberikan kepada ibu hamil dan melahirkan adalah sebagai berikut: Intervensi seribu hari pertama kehidupan, Bertujuan untuk jaminan kualitas pelayanan antenatal terpadu (ANC). Meningkatkan distribusi di fasilitas kesehatan Rencanakan diet tinggi kalori, protein dan Zat Gizi Mikro (TKPM), Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular)

b. Balita

Mendukung tumbuh kembang balita dan merencanakan kegiatan PMT (pemberian makanan tambahan)

c. Anak Usia sekolah

Menghidupkan kembali industri kesehatan sekolah (UKS), memperkuat kelembagaan tim pembina UKS, dan menyiapkan program gizi anak usia sekolah (PROGAS).

d. Remaja

Memperluas sosialisasi tentang pola makan seimbang, berhenti merokok dan penggunaan narkoba, serta melakukan (PHBS) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

2. Pelaksanaan program aksi cepat penurunan, pengendalian, dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang yang sudah berjalan dan rencana mendatang sudah tersusun dengan rapi dan pelaksanaan juga sudah sesuai dengan tujuan dan maksud diadakannya program tersebut. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan berbagai program, diantaranya: pada tahun 2022 pelaksanaan rembuk stunting tingkat kecamatan sudah dilaksanakan pada bulan Juni di 14 kecamatan dilanjutkan pelaksanaan rembuk stunting tingkat kabupaten.

3. Konsultasi stunting dilaksanakan di tingkat kecamatan dua kali dalam setahun. Pada bulan Februari 2022, pendataan e-PPGBM dipercepat melalui penimbangan secara simultan. Pencapaian pendataan EPPGBM mencapai 90% berproses setiap bulan adalah bulan penimbangan serentak. Ketiga pada tahun 2022 Kabupaten Pemalang akan melaksanakan Deklarasi ODF tingkat kabupaten sejalan dengan telah dilaksanakannya verifikasi tingkat Provinsi yakni 25 Mei 2022. Hal ini membantu pencapaian penanda sensitif untuk pengelolaan pencegahan stunting.

4. Keempat Sebagai upaya memberikan bantuan yang maksimal kepada masyarakat, dilakukan upaya peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara progresif sebanyak 1.134 tim dan 3.402 kader TPK di Kabupaten Pemalang. TPK merupakan tameng terdepan dalam penanggulangan dan pencegahan masalah stunting pada anak di tingkat pemerintahan paling bawah yakni desa atau kelurahan.

5. Kabupaten Pemalang sendiri memiliki beberapa program-program unggulan yang berfokus untuk penanggulangan dan pencegahan stunting di kabupaten pemalang, yang mana diciptakan oleh masing-masing Pukesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang yang sudah mendapat perhatian *reward* atau penghargaan dari pemerintah Provinsi hingga nasional. Berikut tabel program unggulan puskesmas di Kabupaten Pemalang:

PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

(Galih Prasongko, Ane Permatasari)

Tabel 4. Program Unggulan Puskesmas

NO	Nama Desa / Kecamatan	Nama Program
1	Desa Bulakan Kecamatan Belik	Aplikasi Anak Bunda = Aplikasi anak balita untuk data antropometri dengan kartu
2	Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan	Gemari Ceting Kayu = Gerakan Makan Ikan Cegah Stunting Kakang Mbakyu
3	Desa Suraya Kecamatan Pemalang	Nasi Ceting = Nutrisi untuk cegah stunting
4	Desa Tumbal Kecamatan Comal	Klating = Kelompok Laki-laki anti Stunting
5	Desa Losari Kecamatan Ampelgading	Gelang Anting Gerakan Penanggulangan Anak Stunting

(Sumber: DINKES Kab. Pemalang)

Masing-masing Unit Kesehatan Pukesmas serta Pemerintah Desa atau kelurahan sama-sama memiliki program unggulan yang mana berada pada table di atas yang telah di jabarkan secara gamblang dalam program-program unggulan dari setiap desa atau pukesmas di wilayah kabupaten pemalang, penurunan pencegahan dan penanggulangan stunting sudah sampai pada taraf pemerintahan di tingkat Desa. Semua *stakeholder* harus bekerjasama dengan tidak adanya ego sektoral dalam pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan stunting. Terbentuknya kerja sama tersebut maka akan membuat semakin cepatnya proses penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Pemalang.

6. Kesehatan ibu hamil sebelum hamil atau pada masa subur selagi masih usia dewasa juga dapat dipengaruhi bagaimana kesuburan dari kandungan yang nantinya akan berdampak pula pada kandungan yang sedang dikandung. Hidup sehat seseorang remaja Putri akan memberikan dampak terhadap masa depan dirinya dan juga janin atau bayi yang kelak akan dikandung. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya fokus terhadap program penanggulangan di 1000 hari pertama kehidupan bayi namun juga fokus terhadap masa pertumbuhan remaja putri, khususnya yang masih bersekolah karena akan jauh lebih mudah untuk diberikan edukasi atau pengetahuan terkait kesehatan tubuh remaja putri. Adanya program tersebut akan mendukung untuk terwujudnya penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Pemalang.

7. Program-program pemerintah mengenai aksi percepatan daerah jangan menurunkan pencegahan dan penanggulangan stunting terfokus kepada desa sebagai objeknya. Nama program ini Desa Lokus stunting yang mana sudah berjalan dari mulai tahun 2019 hingga saat ini di tahun 2022. Pemilihan Desa Lokus stunting di Kabupaten Pemalang didasarkan pada beberapa aspek pertimbangan atau dari beberapa pertimbangan indikator, diantaranya: satu desa memiliki kampung keluarga berencana (kampung KB), belum ODF (*open defecation free*), rawan pangan kemiskinan ekstrem, serta yang terakhir angka prevalensi stunting tinggi. Selain itu, pelaksanaan Desa Lokus juga berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat itu contohnya pada tahun 2019 ini peraturan riskesmas 2003, tahun 2020 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 441.8/24 Tahun 2020 dan peraturan lainnya yang mengingat pada keterlaksanaan program Desa Lokus pada saat itu.

Dari dasar penentuan Desa Lokus, stunting irisan dari beberapa indikator di atas sehingga dapat ditentukan per tahunnya ada sebanyak 10 desa di Kabupaten Pemalang yang menjadi fokus sasaran kegiatan Desa Lokus. Adanya desa lokus ini diharapkan akan mempercepat gerakan dalam penurunan angka stunting karena langsung pada sasaran tujuan yang berada di tingkat desa akan semakin jauh lebih fokus pada suatu penanganan, sehingga *output* pun akan lebih jauh bisa dirasakan dibanding tidak menggunakan program Desa Lokus stunting di Kabupaten Pemalang. Berikut table penyebaran Desa Lokus per tahunnya:

Tabel 5. Penyebaran Desa Lokus per Tahun

2021	2022	2023
Cikadu	Pakembaran	Jatinegara
Jojogan	Belik	Banjarmulya
Batursari	Majalangu	Sugihwaras
Paguyangan	Tundangan	Gondang
Bojongnangka	Semingkir	Kaligelang
Asemdayong	Banjaran	Pesantren
Klegen	Wansel	Kreyo
Pecangakan	Nyamplungsari	Banyumudal
Payung	Bumirejo	Sima
Gunungbatu	Kaliprau	Walangsanga

(Sumber: Dinsoskbpp Kab. Pemalang)

Berdasarkan Desa Lokus stunting di Kabupaten Pemalang yang mana jumlahnya per tahun berada di angka 10 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dengan kerentanan yang berisiko terjadinya kasus stunting. Penerapan program desa Lokus akan semakin mempercepat penanganan stunting karena langsung kepada akar yang berada di tingkat lokasi Desa. Pelaksanaan desa lokus stunting juga berdasarkan pada peraturan atau hasil data perencanaan pembangunan berikutnya. Pada tahun 2019 Desa Lokus stunting Riskesdes 2019, pada tahun 2020 pelaksanaan Desa Lokus stunting di Kabupaten Pemalang berdasarkan pada peraturan SK Kadinkes Pemalang 441.8/24/TAHUN 2020 yang dikeluarkan langsung oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan program desa lokus stunting.

3. Regulasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang sendiri memiliki regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Pemalang: Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pemalang diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 84 Tahun 2019. Alasan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah bahwa stunting merupakan permasalahan gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan fisik anak-anak kurang dari rata-rata usia mereka, sehingga mempengaruhi perkembangan jaringan otak dan kecerdasan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas sumber daya ketika mereka mencapai usia dewasa.

Tata cara pemberlakuan Peraturan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Aksi Daerah oleh Bupati Kabupaten Pemalang yakni dengan tersusunnya atau terbentuk kelembagaan atau tim percepatan aksi daerah penurunan jumlah angka stunting dan juga penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang. Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting dibentuk dalam rangka percepatan

pencegahan stunting di berbagai daerah. Rincian keanggotaan Kelompok Kerja dan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Susunan Tim Koordinasi

1.	Pengarah	Bupati Pemalang
2.	Pembina	Wakil Bupati Pemalang
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
4.	Ketua	Kepala Bappeda
5.	Sekretaris	Kepala Dinkes
6.	Anggota	Kepala Dinas pertanian
7.	Anggota	Kepala Dikbud
8.	Anggota	Kepala Dinsos KBPP
9.	Anggota	Kepala Dinas Perikanan
10.	Anggota	Kepala DPUTR
11.	Anggota	Kepala DPKP
12.	Anggota	Kepala Diskominfo

(Sumber: Bappeda Kab.Pemalang)

Pengimplementasian Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2019 dengan dibentuknya Tim percepatan aksi daerah dalam penurunan angka stunting, penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pemalang memberikan dampak yang sangat signifikan penurunan kasus stunting di kabupaten Pemalang

Dapat dianalisis bahwa bagaimana setelah adanya pembentukan pokja atau tim percepatan aksi daerah dalam penurunan angka dan jumlah stunting, penanggulangan dan pencegahan stunting dapat berjalan dengan baik. Pengimplementasian Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang, provinsi JawaTengah Nomor 84 Tahun 2019 sesuai dengan data di atas telah terlaksana dengan sebaik mungkin dan sesuai apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam peraturan Bupati tersebut.

Penurunan jumlah angka stunting sekarang diperoleh di Kabupaten Pemalang yang mana merupakan kolaborasi dari semua aspek *stakeholder* atau lembaga organisasi perangkat daerah yang saling bekerjasama, gotong royong, dan saling merangkul karena penyelesaian stunting tidak hanya bisa diselesaikan oleh salah satu dinas atau Lembaga organisasi perangkat daerah saja melainkan harus terkonsep dengan matang semua program-program pelaksanaan dalam penanggulangan dan pencegahan stunting.

Demikian hasil dari suatu kebijakan yang melibatkan semua kalangan *stakeholder* di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang semuanya digerakkan dan dilibatkan dalam aksi tersebut, sehingga tujuan dan sasaran dapat berjalan sesuai dengan harapan dari setiap program-program kebijakan terkait.

KESIMPULAN

Collaborative governance mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan stunting di Kabupaten Pemalang dengan begitu baik. Dbuktikan denngan hasil penelitian menunjukan bahwa angga stunting di kabupaten pemalang terus mengalami penurunan dari setiap tahunnya

PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

(Galih Prasongko, Ane Permatasari)

yakni pada tahun 2013 sebanyak 46,3 % dan pada tahun 2022 sebanyak 9,61. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kerjasama konvergensi yang baik antar semua *stakeholder* pemerintahan, swasta, akademisi membantu melaksanakan program-program yang sudah tersusun rapi di dalam Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2019 terkait dengan percepatan aksi daerah dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang. Program-program lanjutan dari aksi daerah harus terus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin melibatkan seluruh *stakeholder* agar jumlah angka stunting terus menurun. Selain itu, pemerintah perlu lebih meningkatkan peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam tata kelola kolaborasi baik dalam bentuk edukasi maupun kegiatan, dan keterampilan lain. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar jumlah angka stunting dapat dikendalikan di Kabupaten Pemalang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian tentang tata kelola kolaboratif di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, guna mengatasi dan menghindari stunting. Ke supervisor dulu. Kedua, dalam mengambil keputusan, merujuk pada narasumber yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang, seperti kepala Dinas Kesehatan, kepala dinas sosial, kepala pengendalian penduduk, kepala dinas. Kepala keluarga berencana, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, kepala pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos KBPP), atau wakilnya. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada komunitas dan Duta GenRe atas bantuannya dan partisipasinya dalam peneliti melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms As A Governance Strategy. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Afandi, M., Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2022). A Penta-Helix Approach To Collaborative Governance Of Stunting Intervention In West Java Indonesia. *European Union Digital Library*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315238>.
- Candarmaweni, C., & Rahayu, A. Y. S. (2020). Collaborative Governance To Achieve Sdgs Social Development: Preventing Stunting Lesson From Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, 211(01014), 1-9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(3), 383-391. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i3.9665>.
- Ni'mah, K., Nadhiroh, S. R. (2015). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Media Gizi Indonesia*, 10(1), 13-19. <https://doi.org/10.20473/mgi.v10i1.13-19>.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Jurnal of Public Policy and Management*, 10(2).
- Rumuat, S.A., Husin. H., & Muhlin, M. (2022). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Banggai. *Journal of Tompotika: Social, Economic and Education Science*, 3(05).
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 80-95. Diakses pada 11 Desember 2022, <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/40>.

PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

(Galih Prasongko, Ane Permatasari)

Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91-113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>.

Supriyatni, N., dkk. (2021). Kolaborasi Cegah Stunting dengan Mempersiapkan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Jambula. *Jurnal Biosainstek*, 3(2), 16-19. <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v3i2.735>.

Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 201–213. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12899>.

Wiyono, S., dkk. (2021). Peningkatan Kapasitas Lintas Organisasi Sosial, Kader, Karangtaruna, Dan Tokoh Masyarakat Lain Untuk Penanganan Stunting Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Lokus Stunting Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan 2021. *Prosiding Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya*, 1(2), 55–63. Diakses pada 27 Desember 2022, <https://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/Pengmas/article/view/826>.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Diakses pada 10 November 2022, <https://www.litbang.kemkes.go.id/hasil-utama-riskesdas-2018/>.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2018). 1 dari 3 Balita Indonesia Derita Stunting. Diakses pada 10 November 2022, <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/1-dari-3-balita-indonesia-derita-stunting>.

Dasman, H. (2019). Empat Dampak Stunting Bagi Anak dan Negara Indonesia. Diakses pada 10 Desember 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/300589717.pdf>.

Halakrispen. (2020). Strategi Kemenkes Tekan Angka Stunting di Jawa Timur dan NTT. Diakses pada 12 November 2022, <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/zNP43MON-strategi-kemenkes-tekan-angka-stunting-di-jawa-timur-dan-ntt>.

Kusnandar, V. B. (2022). 10 Provinsi dengan Angka Stunting Tertinggi Nasional Tahun 2021. Diakses pada 1 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/10-provinsi-dengan-angka-stunting-tertinggi-nasional-tahun-2021>.

Kusnandar, V. B. (2022). Daftar Kabupaten di Lampung dengan Prevalensi Balita Stunting Tertinggi 2021. Diakses pada 1 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/10/daftar-kabupaten-di-lampung-dengan-prevalensi-balita-stunting-tertinggi-2021>